

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)

Rekomendasi Kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Prov.Kalsel untuk Penerbitan Izin Usaha Perkebunan (IUP)

NO	PERSYARATAN
1.	Mengajukan Surat Permohonan kepada Dinas DPMPSTSP Prov. Kalsel
2.	Fotocopy akte notaris pendirian perusahaan dan perubahannya
3.	Fotocopy surat keterangan domisili kantor pusat dan/atau kantor cabang /perwakilan di daerah
4.	Fotocopy Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000 (cetak peta dan file elektronik) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain
5.	Asli Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas kehutanan provinsi apabila areal berasal dari kawasan hutan
6.	Asli Jaminan pasokan bahan baku dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran XII Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013
7.	Fotocopy Dokumen Lingkungan (AMDAL/UKL & UPL)
8.	Asli pernyataan kesanggupan memiliki sarana prasarana dan system untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan
9.	Asli pernyataan kesanggupan memiliki sarana prasarana dan system untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran
10.	Asli pernyataan kesediaan wajib membangun kebun untuk masyarakat yang dilengkapi dengan rencana kerjanya
11.	Asli pernyataan kesediaan dan rencana kerja kemitraan
12.	Asli pernyataan kesanggupan melaksanakan program integrasi sawit-ternak bagi perusahaan perkebunan yang lokasinya dilehan kering dan/atau integrasi sawit-ikan bagi perusahaan perkebunan yang lokasinya dilahan basah dan atau program integrasi lainnya
13.	Asli pernyataan tidak akan membangun pabrik kelapa sawit sebelum terpenuhi luas areal tanam minimal 3.200 hektar
14.	Asli referensi bank yang ada di daerah yang menerangkan bahwa perusahaan memiliki rekening dan menyetor deposit dana jaminan dengan saldo terakhir minimal 1 % (satu persen) dari nilai total rencana investasi
15.	Asli Surat Kuasa bermaterai Rp6.000,00 untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan